

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah kelompok sosial yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Dalam konteks masyarakat perkotaan yang ditandai oleh kompleksitas sosial dan persaingan ekonomi yang tinggi, penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai kelompok yang kurang produktif dan bergantung pada bantuan, sehingga partisipasi sosial mereka dibatasi oleh stigma serta struktur sosial yang tidak inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya dapat dipahami sebagai masalah individu atau biologis, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan relasi kekuasaan, norma sosial, dan pengorganisasian ruang publik.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara kondisi tubuh seseorang dengan hambatan lingkungan sosial yang membatasi partisipasi penuh individu dalam masyarakat (Menteri, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui struktur sosial yang belum sepenuhnya memberikan akses dan pengakuan yang setara. Dengan demikian, persoalan disabilitas perlu dilihat dalam kerangka sosiologis yang menempatkan lingkungan sosial dan ruang publik sebagai faktor kunci dalam membentuk pengalaman hidup penyandang disabilitas

Di Indonesia, perlindungan hak penyandang disabilitas secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Mahkamah Konstitusi RI, 1945). Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, praktik sosial di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas

masih kerap mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam mengakses kesempatan kerja serta ruang publik yang ramah dan inklusif.

Menurut publikasi “Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020” oleh BPS, klasifikasi penyandang disabilitas mengacu pada standar Washington Group on Disability Statistics yang digunakan secara global untuk mengukur tingkat kesulitan fungsional seseorang. Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan tingkat keparahan gangguan aktivitas sehari-hari. Disabilitas tipe 1 mencakup individu dengan kesulitan ringan hingga sedang dalam aktivitas seperti melihat, mendengar, berjalan, atau berkomunikasi, dan sering dijadikan acuan dalam program kebijakan nasional. Disabilitas tipe 3 menunjukkan kondisi yang lebih berat, yakni mereka yang mengalami banyak kesulitan atau tidak mampu sama sekali menjalankan fungsi dasar, tipe ini juga digunakan secara internasional untuk pemantauan capaian SDGs. Adapun disabilitas tipe 4 menggambarkan kondisi paling berat, yaitu individu yang sepenuhnya tidak dapat melakukan fungsi tertentu tanpa bantuan orang lain (Statistik, 2020).



Sumber: Data diolah dari Long Form SP2020

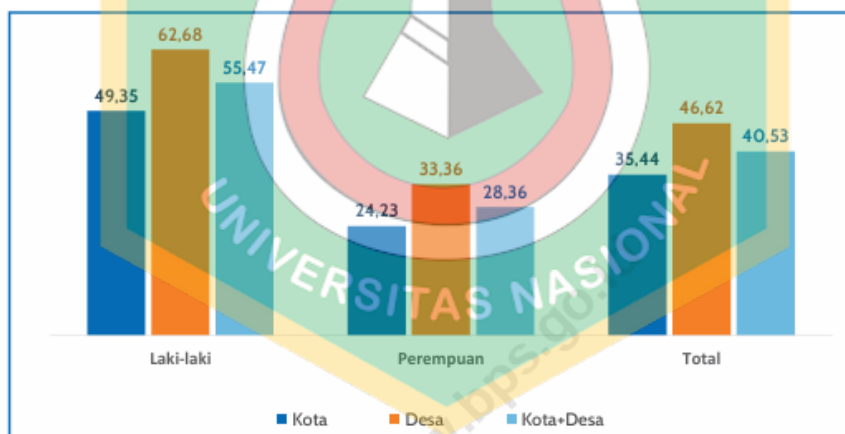
Gambar 5.6 Persentase Penduduk dengan Gangguan Pendengaran Berdasarkan Disabilitas Tipe 1 Menurut Provinsi di Indonesia, 2022

Gambar 1.1.1

Long Form Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas, termasuk disabilitas pendengaran (tunarungu), masih menghadapi tantangan signifikan dalam partisipasi sosial dan ekonomi. Secara nasional, persentase penduduk dengan disabilitas pendengaran tipe ringan hingga sedang mencapai 1,91 persen, sementara di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,64 persen. Meskipun angka ini berada di bawah rata-rata nasional, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di wilayah urban justru cenderung lebih kompleks, terutama terkait akses kerja formal dan interaksi sosial yang setara di ruang publik (Statistik, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 persen tenaga kerja penyandang disabilitas, sedangkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan menyediakan minimal 2 persen dari total pegawainya. Namun demikian, penerapan aturan ini masih membutuhkan penguatan melalui sosialisasi yang lebih luas serta pengawasan yang konsisten agar implementasinya berjalan efektif (BPK RI, 2016).



Sumber: Data diolah dari Long Form SP2020

Gambar 1.1.2

**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
dengan Status Disabilitas Tipe 1, 2022**

Berdasarkan Gambar 1.1.2 dalam publikasi Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi kerja penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status disabilitas tipe 1 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dianalisis dari aspek wilayah dan jenis kelamin. Secara umum, penyandang disabilitas di daerah perdesaan memiliki tingkat partisipasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Persentase penduduk disabilitas tipe 1 yang bekerja di perdesaan mencapai 46,62 persen, sedangkan di perkotaan hanya 35,44 persen, dengan selisih sebesar 11,18 persen poin. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas di pedesaan cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan informal seperti pertanian, usaha rumah tangga, atau sektor yang tidak memerlukan keterampilan formal dan lingkungan kerja yang sangat adaptif.

Selain itu, data dari International Labour Organization (ILO) per Desember 2024 mengungkapkan bahwa hampir 90 persen penyandang disabilitas di Indonesia tergolong tidak aktif secara ekonomi, baik dalam kategori tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan (Gunawan & Rezki, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan disabilitas di Indonesia bukan semata persoalan individu, melainkan masalah struktural.

Masalah struktural tersebut tidak dapat dipisahkan dari stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas. Mereka sering dipandang sebagai individu yang tidak mandiri, kurang kompeten, dan tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan modern. Stigma ini tidak hanya membatasi akses ke pekerjaan, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial sehari-hari di ruang publik, sehingga penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dari proses pembentukan identitas sosial dan pengakuan sosial yang setara.

Dalam sudut pandang sosiologi, keadaan ini menegaskan betapa pentingnya ruang publik sebagai arena sosial di mana individu dapat membangun relasi, identitas, dan makna sosial. Ruang publik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik dan sosial, karena di dalamnya terjadi proses komunikasi, interaksi, dan negosiasi makna antara individu. Namun, ruang publik yang dominan sering kali dibentuk berdasarkan norma mayoritas yang mengedepankan kemampuan verbal

dan sensorik tertentu, sehingga secara tidak langsung mengecualikan penyandang disabilitas, terutama komunitas tunarungu.

Dalam konteks keterbatasan ruang publik yang inklusif tersebut, muncul berbagai inisiatif lokal yang berupaya menghadirkan ruang alternatif bagi penyandang disabilitas. Salah satu inisiatif tersebut adalah Difabis Coffee and Tea, sebuah program pemberdayaan yang diinisiasi oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Difabis Coffee and Tea, yang merupakan singkatan dari *Difabel Bisa*, dirancang sebagai ruang inklusi sosial dan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja profesional bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas tunarungu, di tengah masyarakat perkotaan Jakarta (Difabis, n.d.).

Difabis Coffee and Tea berawal dari sebuah inisiatif sederhana pada tahun 2018 yang bertujuan untuk menciptakan ruang kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Realisasi fisik program ini mulai terlihat pada tahun 2021 ketika Difabis Coffee and Tea pertama kali beroperasi di kawasan Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, dalam bentuk stand booth sederhana (Difabis, n.d.). Lokasinya yang strategis di kawasan transit urban menjadi titik pertemuan berbagai kelompok masyarakat, seperti pekerja kantor, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Difabis Coffee and Tea tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial di mana interaksi antara karyawan tunarungu dan pelanggan non-disabilitas dapat terbangun. Lebih dari sekadar tempat kerja, Difabis Coffee and Tea menjadi arena sosial tempat komunitas tunarungu dapat membentuk identitas sosial, memperkuat solidaritas, dan membangun relasi sosial yang setara.

Konsep utama yang diusung oleh Difabis Coffee and Tea adalah "Secangkir Kopi, Seribu Kesempatan", yang mencerminkan fokus program pada pemberdayaan aktif, bukan sekadar bantuan sosial. Melalui unit usaha Difabis Coffee and Tea, program ini berfungsi sebagai kafe sosial sekaligus tempat magang vokasional selama tiga hingga enam bulan bagi anak muda difabel, khususnya tunarungu. Peserta program dilengkapi dengan berbagai keterampilan, mulai dari keahlian sebagai barista, manajemen stok, hingga penguasaan media digital untuk

mendukung operasional kerja, sehingga mereka memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja yang lebih luas (Difabis, n.d.).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salwa Sabilah dan Almisar Hamid (2025) dalam jurnal WISSEN, Difabis Coffee and Tea yang didirikan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta berfungsi sebagai sarana pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, terutama tunarungu. Melalui pelatihan keterampilan kerja seperti barista, kewirausahaan, keuangan, dan pemasaran digital, program ini berhasil meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri, serta keterampilan komunikasi penyandang disabilitas. Difabis Coffee and Tea menjadi contoh nyata bahwa pemberdayaan difabel dapat dilaksanakan secara efektif melalui model ruang publik yang inklusif, kolaboratif, dan berfokus pada kesetaraan sosial (Sabilah et al., 2025).

Secara global, isu inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi perhatian serius dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (United Nations, 2020). Salah satu poin yang paling relevan adalah Tujuan ke-10 SDGs, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara. Prinsip "*Leave No One Behind*" menegaskan komitmen global untuk memastikan partisipasi dan pengakuan bagi seluruh kelompok sosial, termasuk kelompok marginal. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Nancy Fraser yang menekankan pentingnya ruang publik yang inklusif sebagai arena bagi kelompok terpinggirkan untuk memperoleh visibilitas, partisipasi setara, dan pengakuan sosial.

Dalam kerangka teori ruang publik kritis yang dikemukakan oleh Nancy Fraser, ruang seperti Difabis Coffee and Tea dapat dipahami sebagai ruang publik alternatif (subaltern counterpublic), yaitu ruang diskursif yang memberikan kesempatan kepada kelompok marjinal untuk membangun wacana, identitas, dan praktik sosial di luar dominasi norma mayoritas. Difabis Coffee and Tea menghadirkan pembalikan relasi kuasa simbolik, di mana komunitas tunarungu tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus sepenuhnya menyesuaikan diri, melainkan sebagai aktor utama dalam interaksi sosial. Dengan demikian, Difabis Coffee and Tea berfungsi sebagai arena konstruksi sosial yang memungkinkan terbentuknya

identitas kolektif, interaksi sosial yang setara, serta praktik inklusivitas di tengah masyarakat urban.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara mendalam membahas bagaimana ruang inklusif seperti Difabis Coffee and Tea berfungsi sebagai arena konstruksi sosial bagi komunitas tunarungu masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek manajerial, komunikasi teknis, atau kepuasan pelanggan, dan belum banyak mengkaji pengalaman sosial, pembentukan identitas, serta dinamika interaksi sosial dari perspektif sosiologi ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana Difabis Coffee and Tea dimaknai dan dimanfaatkan oleh komunitas tunarungu sebagai ruang publik alternatif yang inklusif dalam konteks masyarakat urban Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Difabis Coffee and Tea yang menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana ruang tersebut mendukung partisipasi, pembentukan identitas, dan interaksi sosial. Menggunakan pendekatan teori ruang publik, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis makna dan pemanfaatan Difabis Coffee and Tea oleh komunitas tunarungu melalui metode kualitatif. Peneliti ingin melihat bagaimana ruang inklusif dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua individu, sehingga mendukung keberagaman dan partisipasi aktif dalam masyarakat urban yang semakin kompleks.

Untuk memahami hal tersebut, peneliti telah merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana identitas dan interaksi sosial komunitas tunarungu terbentuk melalui aktivitas dan interaksi sosial di Difabis Coffee and Tea?
2. Bagaimana Difabis Coffee and Tea merepresentasikan praktik inklusivitas di lingkungan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Difabis Coffee and Tea berfungsi sebagai ruang publik inklusif yang mampu mendukung

partisipasi, pembentukan identitas, serta interaksi sosial antara komunitas tunarungu dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana konsep ruang inklusif yang diterapkan di Difabis Coffee and Tea dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua individu, sekaligus mendorong keberagaman dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat urban yang semakin kompleks.

1. Menganalisis pembentukan identitas sosial dan dinamika interaksi sosial komunitas tunarungu melalui aktivitas yang berlangsung di Difabis Coffee and Tea.
2. Mengidentifikasi dan menelaah bagaimana Difabis Coffee and Tea merepresentasikan praktik inklusivitas serta solidaritas sosial dalam konteks masyarakat urban.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dimasyarakat. Seperti:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang sosiologi, terutama yang berkaitan dengan teori ruang publik, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana mengenai inklusivitas sosial di ruang-ruang publik perkotaan. Dengan memanfaatkan perspektif Nancy Fraser mengenai ruang publik alternatif (*counterpublic*), penelitian ini menawarkan pemahaman kritis tentang bagaimana ruang publik inklusif seperti Difabis Coffee and Tea berfungsi sebagai arena sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, memperoleh pengakuan, agensi, dan kesempatan berpartisipasi secara lebih setara dalam interaksi sosial di ruang publik perkotaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk rencana publikasi jurnal ilmiah, sehingga temuan penelitian dapat disebarluaskan secara lebih luas dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik sosial yang inklusif di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini bisa jadi contoh konkret tentang pentingnya ruang inklusif di masyarakat serta bahan pertimbangan bagi

pelaku usaha, komunitas sosial, dan siapa pun yang tertarik membangun lingkungan yang lebih ramah dan adil bagi semua kalangan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 10 tentang pengurangan ketimpangan.

3. Manfaat bagi stakeholder: Bagi pemerintah atau pihak yang menyusun kebijakan, penelitian ini bisa jadi masukan dalam menyusun kebijakan ruang publik atau kerja yang lebih inklusif. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran sosial untuk lebih menerima perbedaan, menghargai keberagaman, dan menciptakan ruang sosial yang adil, setara, dan terbuka bagi kelompok yang termarginalkan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai fungsi Difabis Coffee and Tea sebagai ruang publik inklusif yang menjadi arena interaksi sosial antara komunitas tunarungu dengan masyarakat umum di wilayah Jakarta Pusat, khususnya di Difabis Coffee and Tea. Penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek sosial yang mencakup bentuk interaksi sosial, pola komunikasi nonverbal, serta proses pembentukan identitas sosial komunitas tunarungu melalui aktivitas kerja dan relasi sosial yang terjalin di dalam lingkungan kafe. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana Difabis Coffee and Tea berperan sebagai ruang publik yang ramah disabilitas, mendorong partisipasi kelompok marginal, dan menjadi sarana untuk membangun kesetaraan sosial di tengah masyarakat urban. Adapun penelitian ini tidak membahas aspek manajerial, ekonomi bisnis, atau kebijakan pemerintah secara mendalam, melainkan berfokus pada analisis sosiologis terhadap konstruksi sosial, dinamika relasi, dan praktik inklusivitas yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari di Difabis Coffee and Tea. Dengan demikian, batasan tersebut diharapkan dapat menjaga fokus penelitian agar tetap terarah pada pemahaman mengenai makna sosial dan nilai inklusivitas yang dihadirkan Difabis Coffee and Tea bagi komunitas tunarungu dalam konteks masyarakat perkotaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rangkaian sistematis penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi dilaksanakannya penelitian mengenai ruang publik inklusif bagi komunitas tunarungu di Difabis Coffee and Tea. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta batasan masalah agar penelitian tetap fokus pada aspek yang relevan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta pembahasan mengenai konsep-konsep utama seperti disabilitas, interaksi sosial, inklusi sosial, dan stigma sosial. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu perspektif Nancy Fraser mengenai ruang publik alternatif (*counterpublic*) dan kesetaraan partisipatif, serta kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar konsep dan arah analisis yang digunakan dalam penelitian..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Di dalamnya diuraikan desain penelitian, teknik penentuan informan dengan metode purposive sampling, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan analisis tematik. Selain itu, bab ini juga mencantumkan lokasi dan waktu penelitian, yaitu di Difabis Coffee and Tea, Jakarta Pusat, sebagai ruang publik inklusif tempat penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Difabis Coffee and Tea. Temuan penelitian dianalisis secara tematik untuk menggambarkan dinamika interaksi sosial, pola komunikasi, dan pengalaman

individu dengan gangguan pendengaran dalam menginterpretasikan Difabis sebagai ruang publik yang inklusif. Selain itu, bab ini juga mencakup diskusi yang menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teoretis yang digunakan, khususnya perspektif ruang publik alternatif (counterpublic) dari Nancy Fraser, untuk menjelaskan bagaimana praktik inklusivitas dan kesetaraan partisipatif terwujud dalam interaksi sehari-hari di Difabis Coffee and Tea.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga mencakup implikasi teoretis dan praktis dari hasil penelitian terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan ruang publik inklusif dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Di bagian akhir, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar kajian tentang inklusivitas sosial di ruang publik dapat terus dikembangkan.

